

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

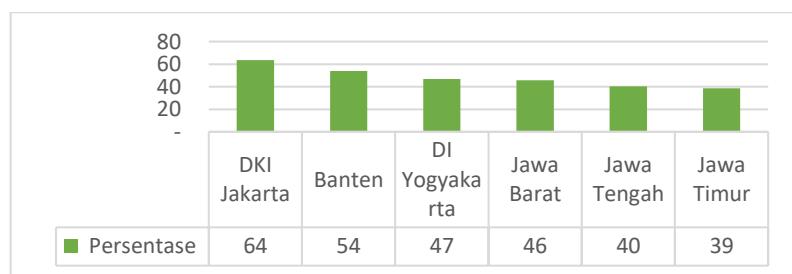
#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi adalah salah satu fokus utama negara-negara berkembang dalam menentukan kebijakan nasional. Menurut pemaparan Todaro & Smith (2006), pembangunan ekonomi menentukan arah kebijakan nasional bagi suatu negara berkembang. Maka dari itu, pembangunan tidak hanya berpusat pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan pada seluruh lapisan masyarakat. Selain meningkatkan output ekonomi secara agregat, pembangunan berkelanjutan juga meliputi berbagai dimensi. Seperti pemerataan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan sumber daya manusia. Kendati demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu tantangan krusial yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang luas dan merata. Hal ini tercermin dari tingkat penyerapan tenaga kerja sebagai indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan.

Menurut perspektif teori pertumbuhan ekonomi klasik, pertumbuhan output nasional diyakini mampu mendorong permintaan terhadap tenaga kerja, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Penyerapan tenaga kerja memperlihatkan bahwa pemerintah daerah mampu

menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya. Dengan demikian, tenaga kerja tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi semata, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dengan peran penting dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Peran tenaga kerja bukan hanya terbatas pada tingkat perusahaan, melainkan memiliki potensi signifikan untuk berkontribusi pada pembangunan keseluruhan suatu negara (Dewi et al., 2024). Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu penggerak utama keberhasilan pembangunan ekonomi, di mana semakin tinggi tingkat penyerapan maka semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah. Dalam buku Pembangunan Ekonomi, Todaro & Smith (2015) mengungkapkan bahwa tingginya penyerapan tenaga kerja menandakan adanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, serta memperlihatkan perekonomian mampu memfasilitasi pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja.

**Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Bekerja Di Sektor Formal Menurut Provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2024**

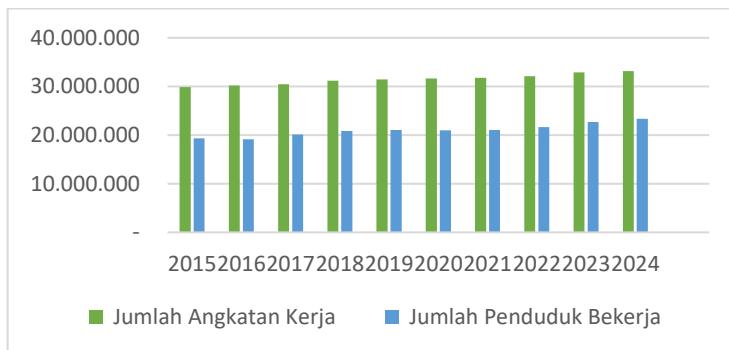


*Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah (2025)*

Seiring dengan berkembangnya zaman, masalah ketenagakerjaan masih menjadi tantangan serius di berbagai negara berkembang. Salah satu contoh nyata terjadi di Provinsi Jawa Timur. Fenomena di Provinsi Jawa

Timur menunjukkan bahwa Provinsi ini menempati peringkat terendah dalam persentase penduduk bekerja di sektor formal dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, yaitu hanya sebesar 38,51% pada tahun 2024. Angka ini jauh tertinggal dari Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 63,69% dan Banten sebesar 53,79%. Bahkan jika dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di peringkat menengah seperti DI Yogyakarta sebesar 46,88%, Jawa Barat sebesar 45,61% dan Jawa Tengah sebesar 40,36%, Provinsi Jawa Timur tetap menjadi provinsi dengan capaian paling rendah. Rendahnya peluang pekerja formal di Provinsi Jawa Timur mengindikasikan belum optimalnya struktur pasar tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja yang layak, stabil serta memenuhi standar ketenagakerjaan nasional, seperti jaminan sosial, perlindungan hukum dan pendapatan yang layak bagi para pekerjanya. Apabila fenomena ini terus berlangsung, maka dikhawatirkan akan memperlebar kesenjangan kualitas tenaga kerja antar provinsi di Pulau Jawa serta menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

**Gambar 1. 2 Perbandingan Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk Bekerja di Provinsi Jawa Timur**



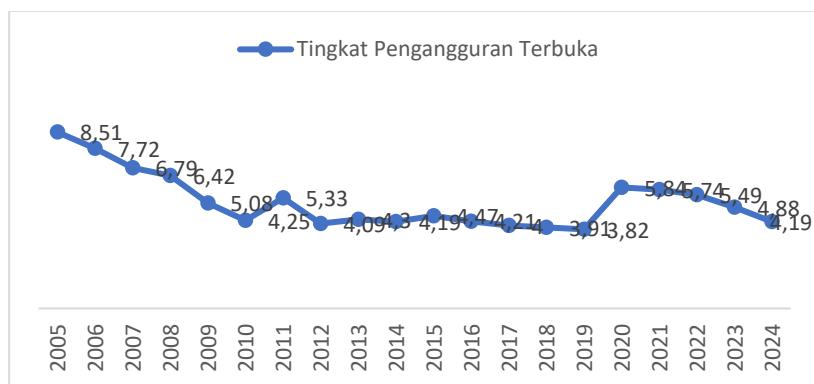
*Sumber : BPS Jawa Timur, data diolah (2025)*

Grafik perbandingan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015 – 2024 menunjukkan adanya tren peningkatan pada kedua variabel tersebut. Angkatan kerja mengalami peningkatan secara konsisten dari sekitar 30 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi lebih dari 32 juta jiwa pada tahun 2024. Hal ini memperlihatkan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di provinsi tersebut. Namun, peningkatan jumlah angkatan kerja tidak sepenuhnya diimbangi oleh pertumbuhan jumlah penduduk bekerja. Meskipun jumlah penduduk bekerja juga menunjukkan tren naik, laju pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan dengan angkatan kerja.

Kondisi ini selaras dengan fakta bahwa tidak semua pertumbuhan dalam jumlah angkatan kerja dapat secara otomatis dikonversi menjadi pertumbuhan dalam jumlah pekerja. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk usia produktif dengan ketersediaan lapangan kerja serta kualitas tenaga kerja yang belum optimal mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran terbuka. Hal ini menjadi hambatan struktural dalam menciptakan ekonomi daerah yang sehat. Sektor informal masih menjadi penampung utama bagi mayoritas tenaga kerja, memperlihatkan bahwa pemerintah masih kesulitan dalam menciptakan pekerjaan yang layak. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi dalam dua dekade terakhir. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan antara laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan

kemampuannya dalam mengimbangi peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. Perlu diketahui bahwa selisih angka antara jumlah angkatan kerja dan penduduk bekerja tidak secara langsung menunjukkan angka pasti pengangguran terbuka. Dikarenakan perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki kriteria khusus, seperti status aktif mencari kerja dan kesiapan bekerja sebagaimana didefinisikan oleh Badan Pusat Statistika (BPS).

**Gambar 1. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2024**



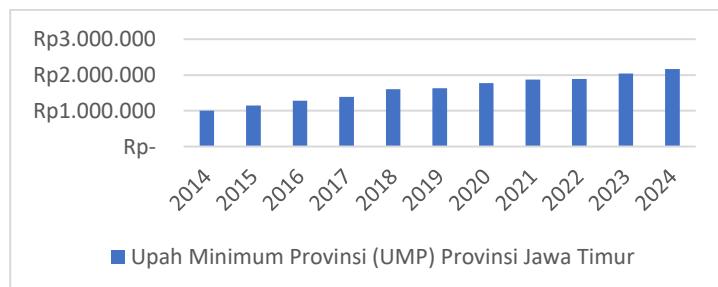
*Sumber : BPS Jawa Timur, data diolah (2025)*

Gambar diatas menunjukkan pada tahun 2005, TPT tercatat sebesar 8,51% merupakan titik tertinggi dalam rentang waktu penelitian. Kemudian setelah mengalami tren secara bertahap dari tahun 2005, TPT akhirnya mencapai titik terendah pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 TPT mengalami lonjakan hingga kembali ke 5,84% akibat pandemi *covid-19*. Meskipun terjadi penurunan kembali pada 2023 sebesar 4,88% dan 2024 sebesar 4,19%, artinya sekitar 4 dari setiap 100 orang dalam angkatan kerja masih belum memiliki pekerjaan. Persentase ini belum dapat mengembalikan tren TPT ke angka sebelum pandemi. Tren ini

memperlihatkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur mudah terpengaruh oleh guncangan ekonomi, khususnya saat terjadi tekanan global akibat pandemi.

Merumuskan kebijakan nasional oleh pemerintah dapat menjadi stimulus bagi perluasan lapangan kerja. Hal ini harus dilakukan agar pemerintah dapat menentukan alat-alat yang digunakan dalam kebijakan ekonomi guna mengurangi tingkat pengangguran (Pristanti, 2019). Salah satu instrumen kebijakan berpotensi besar mendukung upaya tersebut ialah penetapan upah minimum setiap tahun dengan tujuan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja. Penerapan upah minimum oleh pemerintah memiliki pengaruh pada permintaan pasar tenaga kerja (Warapsari et al., 2020). Salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yakni kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP). Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah minimum memiliki tujuan untuk memberikan jaminan hak bagi pekerja atas penghidupan yang layak.

**Gambar 1.4 Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2024**



*Sumber : BPS Jawa Timur, data diolah (2025)*

Dapat dilihat pada grafik tersebut upah minimum provinsi (UMP) mengalami kenaikan yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Dengan lonjakan signifikan terjadi pada periode 2014 hingga 2018. Dapat diketahui bahwa dari tahun 2014 ke 2015 meningkat sebesar Rp 150.000, pada tahun 2016 meningkat kembali sebesar Rp 133.000, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 105.000 dan pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp 210.000. Dengan melihat peningkatan upah minimum provinsi memperlihatkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan pengupahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku mengenai ketenagakerjaan. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kenaikan upah memiliki pengaruh kecil terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri besar dan menengah di Sumatera Barat (Sulthana & Ariusni, 2024). Situasi ini menunjukkan peningkatan upah minimum yang tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja hanya akan menyebabkan pembebanan biaya bagi pelaku UMKM.

Selain faktor upah minimum, pendidikan turut serta berperan dalam membentuk kualitas tenaga kerja. Akses pendidikan yang layak mendukung peningkatan adaptasi, produktivitas serta membuka kesempatan kerja. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu, karena melalui pendidikan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilakukan, sehingga menjadi dasar dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rohadin & Nurcahyo, 2019). Studi oleh Pertiwi (2019) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja antar wilayah di Indonesia.

Namun, di Jawa Timur, peningkatan rata-rata lama sekolah belum tentu sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan terjadi kesenjangan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengetahui apakah rata-rata lama sekolah di Jawa Timur telah sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Faktor lainnya yang sering diasumsikan berpengaruh terhadap tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatnya kapasitas suatu perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran pertumbuhan ekonomi menggunakan kenaikan dari Produk Domestik Bruto (PDB) secara riil. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan adanya peningkatan pendapatan nasional, lapangan kerja dan produktivitas. Menurut mankiw, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja digambarkan secara teoritis melalui Hukum Okun, yakni dinyatakan bahwa setiap peningkatan PDB sebesar dua persen berpotensi menurunkan angka pengangguran sebesar satu persen melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja (Purba & Damanik, 2024).

**Gambar 1. 5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2005 – 2024**



*Sumber : BPS Jawa Timur, data diolah (2025)*

Melihat grafik tersebut, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur menunjukkan pola relatif stabil pada kisaran 5% hingga 6,5% selama periode 2005 – 2018. Puncak pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2012 dengan angka 6,64% mencerminkan momentum ekspansi ekonomi yang kuat. Namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi tajam dengan angka pertumbuhan -2,33%, angka ini merupakan satu-satunya pertumbuhan negatif dalam dua dekade terakhir. Kontraksi angka pertumbuhan tersebut mencerminkan dampak serius akibat dari pandemi *covid-19* terhadap kegiatan ekonomi berbagai sektor di seluruh dunia. Meski demikian, perekonomian menunjukkan adanya indikasi pemulihan pada tahun-tahun setelahnya. Pada tahun 2021 tumbuh menjadi 3,56%, kemudian pada tahun 2022 naik lagi menjadi 5,34%, meskipun belum sepenuhnya kembali ke tingkat pertumbuhan sebelum pandemi melanda.

Menurut penelitian Purba & Damanik (2024), ditemukan hasil penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Samosir. Namun faktanya,

pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak selalu berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja apabila tidak didukung oleh kebijakan dan kondisi sosial ekonomi yang memadai. Menurut Sabyan & Wiarta (2024), suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai sebelumnya. Semakin pesatnya perekonomian di daerah, maka perkembangan pun terasa semakin meningkat. Disamping itu, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan harus dapat memastikan bahwa pertumbuhan tersebut inklusif dan mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi penduduknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur dan mengkaji lebih dalam lagi tentang **“ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP), RATA-RATA LAMA SEKOLAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TIMUR”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang ditemukan pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur.

## 1.4 Ruang Lingkup

Jangkauan dalam penelitian ini mencakup penerapan metode kuantitatif dengan menggunakan data time series dengan fokus pada wilayah Provinsi Jawa Timur. Sumber data diperoleh dari situs resmi Badan

Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Provinsi Jawa Timur dengan rentang waktu dari tahun 2005 hingga 2024. Fokus pada penelitian ini yakni untuk menganalisis berbagai aspek yang mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Penelitian ini melibatkan beberapa variabel bebas, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), Rata-rata Lama Sekolah, dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur sebagai variabel terikat.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian diatas, maka dirumuskan manfaat penelitian, sebagai berikut :

**1. Bagi Pemerintah**

Sebagai saran dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan serta melakukan perencanaan pembangunan di masa mendatang, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur.

**2. Bagi Penulis**

Sebagai syarat guna memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

**3. Bagi Peneliti Lain**

Sebagai kajian literatur dengan memberikan pengetahuan dan wawasan tentang penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.